

Identitas nasional dan politik luar negeri: Studi kasus diplomasi kebudayaan

Ahmad Arinal Huda Naf'an

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: Arinalhuda0001@gmail.com

Kata Kunci:

Identitas nasional, batik indonesia, diplomasi kebudayaan, sengketa budaya, politik luar negeri

Keywords:

National identity, indonesian batik, cultural diplomacy, cultural dispute, foreign policy

ABSTRAK

Batik merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang telah diakui oleh UNESCO sebagai Warisan Budaya Tak Benda. Namun, klaim Malaysia terhadap batik sebagai bagian dari warisan budayanya telah menimbulkan perdebatan diplomatik dan nasionalisme budaya di kedua negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana identitas nasional Indonesia dipertahankan melalui diplomasi kebudayaan dalam menghadapi sengketa budaya ini. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus, penelitian ini mengeksplorasi strategi diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, termasuk kampanye internasional, penguatan hak kekayaan intelektual, dan peran masyarakat dalam mempertahankan batik sebagai simbol identitas nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diplomasi kebudayaan

berperan penting dalam memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional, tidak hanya untuk mempertahankan warisan budaya tetapi juga sebagai bagian dari strategi politik luar negeri dalam membangun citra bangsa. Studi ini memberikan wawasan bagi akademisi dan pembuat kebijakan mengenai pentingnya soft power dalam melindungi warisan budaya serta dampaknya terhadap hubungan antarnegara.

ABSTRACT

Batik is one of Indonesia's cultural heritages that has been recognized by UNESCO as an Intangible Cultural Heritage. However, Malaysia's claim over batik as part of its cultural heritage has sparked diplomatic debates and cultural nationalism in both countries. This study aims to analyze how Indonesia's national identity is preserved through cultural diplomacy in response to this cultural dispute. Using a qualitative approach and case study, this research explores the diplomatic strategies implemented by the Indonesian government, including international campaigns, intellectual property reinforcement, and community involvement in preserving batik as a symbol of national identity. The findings indicate that cultural diplomacy plays a crucial role in strengthening Indonesia's position on the global stage, not only to protect its cultural heritage but also as part of foreign policy strategy in shaping the nation's image. This study provides insights for academics and policymakers on the significance of soft power in safeguarding cultural heritage and its impact on international relations.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Identitas nasional terdiri dari dua konsep utama, yaitu "identitas" dan "nasional." Secara umum, identitas mengacu pada karakteristik atau sifat khas yang melekat pada individu maupun kelompok, yang berfungsi sebagai pembeda dari entitas lainnya. Sementara itu, kata "nasional" menggambarkan identitas yang dimiliki oleh sekelompok orang yang memiliki kesamaan dalam aspek budaya, agama, ciri fisik, aspirasi, maupun tujuan bersama. Identitas nasional menjadi elemen utama dalam pembentukan karakter suatu bangsa, mendeskripsikan nilai-nilai, tradisi budaya, serta sejarah yang menyatukan masyarakat dalam satu kesadaran bersama. Keberadaan identitas ini memperkuat rasa kebanggaan dan solidaritas, yang berperan krusial dalam perumusan kebijakan yang mencerminkan kehendak rakyat serta menjamin stabilitas sosial (Faslah, 2024).

Dalam konteks politik luar negeri, identitas nasional menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kedaulatan dan citra bangsa. Kasus klaim Malaysia terhadap batik Indonesia menunjukkan bagaimana warisan budaya dapat menjadi isu diplomasi. Batik, yang telah diakui oleh UNESCO pada tahun 2009 sebagai Warisan Budaya Tak Benda, merupakan bagian tak terpisahkan dari sejarah dan tradisi masyarakat Indonesia. Klaim Malaysia terhadap batik sebagai bagian dari warisan budayanya telah memicu perdebatan diplomatik, yang bukan hanya menyangkut aspek budaya tetapi juga memperlihatkan bagaimana sebuah negara menggunakan diplomasi kebudayaan untuk mempertahankan identitasnya.

Sejarah kebudayaan Indonesia memberikan dasar yang kuat bagi pembentukan identitas nasional, mencerminkan keberagaman serta nilai-nilai multikultural yang berkembang dari masa ke masa. Menurut (Amalina, 2022) menjelaskan bahwa memahami sejarah kebudayaan Indonesia dapat menjadi cara untuk menghadapi tantangan dalam membangun dan mempertahankan kebudayaan nasional. Hal ini berkaitan erat dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berlandaskan Pancasila, mendorong masyarakat untuk bersatu, bekerja sama, dan menjaga identitas kebangsaan. Dalam hal ini, diplomasi kebudayaan berperan sebagai soft power dalam membangun citra bangsa dan mempertahankan warisan budaya dari klaim pihak lain. Melalui berbagai strategi seperti kampanye internasional, penguatan hak kekayaan intelektual, dan keterlibatan masyarakat, Indonesia berupaya memastikan bahwa batik tetap diakui sebagai bagian dari identitas nasionalnya. Dengan demikian, pelestarian sejarah dan kebudayaan bukan hanya sebagai upaya akademik, tetapi juga memiliki peran penting dalam politik luar negeri, menjaga warisan budaya, serta memperkuat solidaritas nasional.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang bertujuan untuk memahami bagaimana diplomasi kebudayaan berperan dalam mempertahankan identitas nasional Indonesia dalam menghadapi klaim Malaysia terhadap batik. Teknik Pengumpulan Data pada Penelitian ini menggunakan metode studi dokumen, di mana data diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti: Dokumen resmi, Publikasi akademik, Laporan UNESCO, Sumber media. Teknik

Analisis Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis isi, yang bertujuan untuk mengidentifikasi tema-tema utama dalam kebijakan diplomasi kebudayaan Indonesia.

Pembahasan

Identitas nasional, yang mencakup nilai-nilai budaya, sejarah, dan tradisi masyarakat, merupakan elemen kunci dalam memperkuat solidaritas dan karakter bangsa. Menurut (Faslah, 2024), identitas nasional berfungsi sebagai alat pemersatu, pembeda, landasan negara, nilai kualitas suatu negara, dan bentuk perlindungan diri. Dalam konteks Indonesia, identitas nasional tercermin dalam keberagaman budaya yang diikat oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan nilai-nilai Pancasila. Keberagaman ini menjadi aset strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional, terutama ketika menghadapi tantangan seperti sengketa budaya atas batik dengan Malaysia.

Batik, sebagai salah satu warisan budaya Indonesia yang diakui UNESCO sebagai Warisan Budaya Tak Benda pada 2 Oktober 2009, menjadi simbol identitas nasional yang kaya akan nilai historis dan multikultural. Menurut (SRIWININGSIH, 2021), batik mencerminkan dinamika budaya Indonesia melalui motif-motif seperti Kawung, yang melambangkan sumber energi universal, dan Mega Mendung dari Cirebon, yang menjadi ikon budaya lokal. Total 30 motif batik yang tercatat menunjukkan kekayaan tradisi yang telah berkembang sejak era kerajaan Majapahit, Mataram, Solo, dan Yogyakarta, dengan pengaruh budaya Tionghoa (motif phoenix) dan Eropa (motif bunga tulip). Dalam kehidupan modern, batik telah menjadi bagian dari identitas nasional yang diperkuat melalui kebijakan seperti penggunaan batik oleh siswa dan pegawai negeri pada hari Jumat sejak masa Orde Baru. Namun, klaim Malaysia terhadap batik sebagai bagian dari warisan budayanya memicu tantangan terhadap identitas nasional Indonesia, sehingga mendorong pemerintah untuk menggunakan diplomasi kebudayaan sebagai strategi soft power.

Nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diuraikan oleh (Rohman, 2024) dalam Maliki Interdisciplinary Journal, menjadi landasan moral dalam mempertahankan identitas nasional di tengah tantangan seperti sengketa budaya. Sila kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab), sila ketiga (Persatuan Indonesia), dan sila kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia) mendorong solidaritas nasional untuk melindungi warisan budaya seperti batik. Dalam konteks sengketa budaya dengan Malaysia, nilai persatuan Indonesia menjadi dasar bagi pemerintah dan masyarakat untuk bersatu dalam kampanye diplomasi kebudayaan, seperti pendaftaran batik ke UNESCO pada 2008 dan promosi budaya melalui festival internasional. Tantangan seperti rasisme, misalnya insiden mahasiswa Papua 2019 atau diskriminasi terhadap Suku Orang Rimba di Jambi,

menunjukkan bahwa solidaritas nasional perlu terus diperkuat untuk mendukung upaya diplomasi kebudayaan. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, Indonesia dapat memastikan bahwa keberagaman budaya, termasuk batik, tidak hanya menjadi simbol identitas nasional, tetapi juga alat untuk memperkuat harmoni sosial dalam menghadapi ancaman terhadap warisan budaya.

Diplomasi kebudayaan menjadi instrumen penting dalam politik luar negeri Indonesia untuk mempertahankan batik sebagai identitas nasional. Menurut (Febrian, 2021), pengakuan UNESCO terhadap batik pada 2009 memberikan legitimasi internasional yang memperkuat posisi Indonesia dalam sengketa budaya dengan Malaysia. Strategi diplomasi kebudayaan yang diterapkan meliputi pendaftaran resmi batik sebagai warisan budaya pada 2008, kampanye nasional dan internasional untuk meningkatkan kesadaran global, serta kerja sama dengan lembaga internasional melalui festival seni dan pameran budaya. Langkah-langkah ini tidak hanya melindungi batik dari klaim budaya asing, tetapi juga memperkuat citra Indonesia sebagai bangsa yang kaya akan warisan budaya. Selain itu, penguatan hak kekayaan intelektual dan keterlibatan masyarakat dalam mempromosikan batik, seperti melalui inovasi motif dan teknik pemasaran, memastikan keberlanjutan batik sebagai simbol identitas nasional di tengah dinamika globalisasi. Dengan demikian, diplomasi kebudayaan tidak hanya mempertahankan warisan budaya, tetapi juga memperkuat hubungan antarnegara dan posisi Indonesia di kancah global.

Kesimpulan dan Saran

Identitas nasional Indonesia, yang diwujudkan melalui keberagaman budaya, nilai-nilai Pancasila, dan warisan budaya seperti batik, memainkan peran sentral dalam memperkuat solidaritas dan karakter bangsa. Batik, sebagai Warisan Budaya Tak Benda yang diakui UNESCO pada tahun 2009, mencerminkan kekayaan sejarah dan multikulturalisme Indonesia, dengan motif seperti Kawung dan Mega Mendung yang menjadi simbol identitas nasional. Namun, sengketa budaya dengan Malaysia atas klaim batik menggarisbawahi pentingnya diplomasi kebudayaan sebagai strategi soft power dalam politik luar negeri. Nilai-nilai Pancasila, khususnya persatuan dan keadilan sosial, menjadi landasan moral bagi pemerintah dan masyarakat untuk bersatu dalam kampanye seperti pendaftaran batik ke UNESCO dan promosi budaya melalui festival internasional. Strategi diplomasi kebudayaan, termasuk penguatan hak kekayaan intelektual dan keterlibatan masyarakat, tidak hanya berhasil melindungi batik dari klaim asing, tetapi juga memperkuat citra Indonesia di kancah global. Dengan demikian, diplomasi kebudayaan terbukti efektif dalam mempertahankan identitas nasional sekaligus memajukan hubungan antarnegara di tengah dinamika globalisasi.

Saran

1. Pemerintah Indonesia perlu terus memperkuat strategi diplomasi kebudayaan melalui penyelenggaraan festival budaya internasional dan pameran batik di berbagai negara untuk meningkatkan kesadaran global terhadap warisan budaya Indonesia.
2. Penguatan pendidikan kewarganegaraan berbasis nilai-nilai Pancasila harus ditingkatkan untuk memperkuat solidaritas nasional, terutama dalam menghadapi tantangan seperti rasisme yang dapat melemahkan upaya kolektif dalam melindungi identitas budaya.
3. Keterlibatan generasi muda dalam inovasi motif batik dan teknik pemasaran harus didorong melalui program pelatihan dan dukungan ekonomi, agar batik tetap relevan sebagai simbol identitas nasional di era globalisasi.
4. Pemerintah disarankan untuk memperluas kerja sama dengan lembaga internasional, seperti UNESCO, untuk mendaftarkan warisan budaya lain guna mencegah potensi sengketa budaya di masa depan.
5. Penguatan regulasi hak kekayaan intelektual perlu diperketat untuk melindungi batik dan warisan budaya lainnya dari klaim asing, dengan melibatkan komunitas lokal dalam proses pengawasan dan promosi.

Daftar Pustaka

- Amalina, S. N. (2022). Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Indonesia berbasis Pendidikan Multikultural. *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual*, 7(4), 853–862. <http://repository.uin-malang.ac.id/11988/>
- Faslah, R. (2024). IDENTITAS NASIONAL GEOSTRATEGI & GEOPOLITIK Membangun Keberlanjutan dan Kedaulatan. <http://repository.uin-malang.ac.id/20872/>
- Febrian, A. D. (2021). Peran United Nations Educational, Scientific, And Cultural Organization (Unesco) Dalam Menangani Isu Penghancuran Warisan Budaya Dunia Di Suriah Oleh Islamic State Of Iraq And Syria (Isis) Pada Tahun 2012-2019. *Pharmacognosy Magazine*, 1–104.
- Rohman, A. (2024). Implementasi nilai pancasila : Menghadapi problematika rasisme dan diskriminasi. 2(7), 147–156. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/8779>
- SRIWININGSIH, H. (2021). Tinjauan Peran World Intellectual Property Organization (Wipo) Terhadap Perlindungan Traditional Knowledge Di Indonesia Menurut Paris Convention 1883. *Doctoral Dissertation, Universitas Islam Riau*. <https://repository.uir.ac.id/13613/1/151010033.pdf>